

Pancasila dan Tantangan Etika Publik pada Era Keterbukaan Informasi Digital

Daffa Muhammad Dzaky^{1*}, Mei Denta Rahmania², Farhan Zaky Hasan³, Ferdy Reuhanyalevi Mulandri⁴, Suparmi⁵

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: daffamuhammaddzaky@student.uns.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 26-11-2025
Disetujui 06-12-2025
Diterbitkan 08-12-2025

ABSTRACT

The era of information openness brings both opportunities and risks to the practice of public ethics in Indonesia. This article examines how the value of Pancasila as a system of norma can play a role in maintaining integrity, togetherness, and social justice amidst the rapid flow of information, content decentralization thru digital platforms, and the increasing phenomenon of disinformation/hoaxes. Thru a systematic literature review approach to scientific publications and policy studies related to public information disclosure, this discussion addresses the main challenges: the tension between transparency and privacy, the spread of hoax and hate speech, weaknesses in public information governance capacity, and normative disruptions to how publics communicates. The study's finding indicate that Pancasila provides a relevant normative value framework as a principle for digital public life, but its actualization requires institutional policies, online literacy programs, and adaptive law enforcement mechanisms. Recommendations include integrating Pancasila-based citizenship education and collaborating on digital platforms for proactive content moderntadation.

Keywords: Pancasila; Information; Ethics; Challenge; Public, Digital.

ABSTRAK

Era keterbukaan informasi membawa peluang sekaligus risiko praktik etika publik di Indonesia. nilai-nilai Pancasila sebagai sistem tata susila dapat berperan menjaga integritas, kebersamaan, dan kesetaraan sosial di tengah perkembangan informasi cepat, desentralisasi konten melalui platform digital, dan seiring meningkatnya fenomena disinformasi/Hoaks. Melalui metode pendekatan literatur sistematis(*literature systematic*) dari jurnal publikasi ilmiah dan kajian prosedur terkait keterbukaan informasi publik, pembahasan ini terkait tantangan utama yaitu ketegangan antara transparansi dan privasi, penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian kelemahan kapasitas tata kelola informasi publik dan disrupsi normatif terhadap cara publik berkomunikasi. Hasil temuan kajian menunjukkan bahwa Pancasila menyediakan kerangka nilai normatif dianggap relevan sebagai prinsip publik digital, namun aktualisasinya memerlukan kebijakan institusional, program literasi online, dan mekanisme penegakan hukum yang adaptif. Rekomendasi meliputi integrasi pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila serta kolaborasi platform digital untuk modernisasi konten pro-aktif.

Katakunci: Pancasila; Informasi; Etika; Tantangan ; Publik; Digital.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Daffa Muhammad Dzaky, Mei Denta Rahmania, Farhan Zaky Hasan, Ferdy Reuhanyalevi Mulandri, & Suparmi, S. (2025). Pancasila dan Tantangan Etika Publik pada Era Keterbukaan Informasi Digital. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 220-226. <https://doi.org/10.63822/nhvqzb73>

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah negara dan prinsip hidup bangsa Indonesia berperan penting dalam membentuk nilai-nilai norma juga etika yang menjadi pedoman hidup di masyarakat.(Servinta et al., 2025). Pelayanan publik di era ini penuh dengan informasi, mengalami banyak perubahan karena teknologi digital serta popularitas akan transparansi yang semakin tinggi. Pemerintah serta petugas masyarakat kini harus memenuhi harapan yang lebih besar dari warga tentang kejujuran, tanggung jawab, serta informasi yang jelas . Namun, perubahan ini juga membawa tantangan etis baru yang memaksa kita untuk menyesuaikan norma masyarakat dalam dunia birokrasi yang modern. (Syadiyah et al.,2024)

Etika publik adalah kumpulan nilai-nilai yang membantu aparat negara bertindak adil, jujur, profesional, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam pemerintahan, penerapan nilai kesopanan publik sangat penting guna menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Syadiyah et al.,2024) Tetapi, ketika prinsip keterbukaan dijalankan melalui teknologi digital, muncul masalah baru, seperti potensi mencakup data berakibat terjadi pelanggaran privasi, serta ketidakadilan dalam akses informasi bagi masyarakat.

Menurut (Muliawaty & Framesthi, 2020) perubahan digital dalam kinerja berdampak besar pada cara pemerintah dijalankan , tetapi juga menyebabkan kurangnya adab. Banyak petugas publik yang belum siap menghadapi masalah moral yang muncul dari penggunaan teknologi dan media sosial dalam pelayanan publik. Di era keterbukaan informasi, petugas perlu memahami tidak sekedar cara mengelola data secara teknis, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.Lebih lanjut (Hutauruk et al., 2021) menjelaskan bahwa perbedaan antara perkembangan teknologi dan kesiapan norma di lingkup publik menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan reformasi birokrasi 4.0. Banyak institusi pemerintah yang masih fokus pada teknologi digital tanpa memperhatikan tata kelola administrasi, seperti keamanan data, keadilan informasi, dan tanggung jawab sosial oleh para petugas berwenang.Akibatnya, hal ini dapat berdampak pada masalah administrasi dan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Emina, (2020) juga memperingatkan bahwa tindakan online dalam pelayanan publik bisa kehilangan nilai moral jika tidak didasarkan pada budi pekerti yang kuat. Keterbukaan informasi tanpa prinsip yang baik justru dapat menyebabkan kerusakan , data yang dimanipulasi , dan informasi yang salah . Oleh karena itu, aturan publik harus menjadi pedoman bagi petugas dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam teknologi dan informasi.di Indonesia, tantangan tata krama publik di zaman keterbukaan informasi berhubungan dengan kurangnya pengawasan serta partisipasi masyarakat.

Afiyah et al., (2023) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi warga dalam membuat sistem standar dan akuntabilitas publik adalah penghalang besar dalam penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Seringkali masyarakat belum memahami hak mereka untuk mendapatkan informasi, sementara birokrasi masih belum sepenuhnya terbuka dalam memberikan akses kepada data publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merombak struktur ruang publik sehingga akses, distribusi, dan produksi informasi menjadi lebih cepat serta lebih terdesentralisasi.(Mas'ud & Istianah, 2025).Fenomena ini memperbesar peluang partisipasi publik sekaligus meningkatkan risiko proliferasi disinformasi dan hoaks yang dapat mengganggu kohesi sosial dan tata krama publik.(Oktaviani & Fitri Helmi, 2025). Dalam konteks Indonesia, prinsip keterbukaan informasi publik dianggap sebagai komponen penting supaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka serta akuntabel. (Vol et al.,2022)

Secara bersamaan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial memiliki potensi sebagai kerangka etika publik untuk merespons tantangan era keterbukaan informasi. (Sari et al., 2025.) Penelitian-penelitian pendidikan karakter dan komunikasi menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan dan praktik komunikasi digital dapat membantu mengurangi penyebaran narasi negatif dan memperkuat narasi kebangsaan. (Dhea Rivani Gultom et al., 2023). Meski demikian, literatur juga mengidentifikasi hambatan implementasi, antara lain kapasitas kelembagaan, regulasi yang belum konsisten, serta rendahnya literasi digital masyarakat yang mempengaruhi efektivitas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital. (Azka, 2025)

Karenanya, kajian ini menempatkan Pancasila sebagai fokus analisis etika publik yang harus direlevansikan dengan kebijakan keterbukaan informasi, praktik media sosial, dan upaya peningkatan literasi digital untuk menjaga kualitas demokrasi dan kohesi sosial di era informasi. (Supyansuri, 2025)

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan etika publik pada era keterbukaan informasi.
2. Mengidentifikasi tantangan utama yang muncul akibat keterbukaan informasi kesalahan informasi, privasi, dan akuntabilitas.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan praktik operasional untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar moral publik digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (systematic literature review) pada jurnal, kebijakan yang terpublikasi antara Tahun 2020 - 2025. Sumber-sumber dipilih berdasarkan relevansi pada topik Pancasila dan etika publik dengan kata kunci keterbukaan informasi; hoaks/mis-informasi, kebijakan, Analisis bersifat kualitatif-deskriptif dengan mengelompokkan temuan menurut kajian yang akan di bahas: etika, tantangan tata kelola informasi, dampak sosial-budaya, dan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menurut hasil analisa data dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa etika publik di era keterbukaan informasi berpengaruh secara langsung terhadap pergeseran nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia. Hasil kajian literatur menunjukan bahwa sebagian responden mengalami penurunan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila seperti penyebaran berita palsu, pelanggaran privasi, dan rasa tanggung jawab antar individu akibat berkembangnya teknologi semakin canggih. Temuan ini menegaskan mengenai tantangan pada penerapan Pancasila di era keterbukaan informasi mudah diakses dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar dapat mempertahankan karakteristik dari nilai Pancasila.

Tabel 1. Hasil Kajian Literatur

No	Nama Peneliti dan Tahun	Subjek	Metode	Hasil Penelitian
1	Nurbani Yusuf, Arif Prasetyo Wibowo , Budiono(2024)	Privasi dan Keamanan Data	Deskriptif	Kurangnya masyarakat Indonesia dalam beretika di media sosial
2	Dinda Trisnati, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia(2025)	Keterbukaan informasi publik	Kualitatif	Keterbukaan informasi Publik terkait lembaga legislatif
3	Aris Sarjito (2024)	Penyebaran disinformasi dan Hoaks	Kualitatif	penyebaran hoaks berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik, mempengaruhi opini masyarakat dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah
4	Muhammad Fahreza Bahtiar, Nabilah Atika Sari, Muhammad Faqih Annshori(2025)	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Desa	Kualitatif	implementasi pengembangan website Pemerintah Desa Sukonolo belum berjalan optimal
5	Fathur Firman Syeh, Andi Subhan Amir, Nosakros Arya(2022)	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan	Kuantitatif	Seluruh website pemerintah daerah Sulawesi Selatan belum maksimal dalam menampilkan Informasi Publik
6	Debi Servinta Br Perangin - angin, Masniar, Frengki Pangaribuan, Sadrah Mesak Manik, Sri Yunita, Surya Dharma(2025)	Pancasila Sebagai Acuan Moral dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa	kualitatif	mayoritas guru menyadari pentingnya pendidikan Pancasila dan berusaha untuk mengimplementasikannya secara efektif.
7	Istani (2022)	Aktualisasi Pancasila Guna Pembentukan Etika Bernegara	Kuantitatif	Aktualisasi Pancasila dalam membentuk Etika Bernegara telah terbukti kemampuannya untuk membina hubungan sesama Bangsa Indonesia dan antar bangsa-bangsa di dunia ini.
8	Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, Dr. Irwansyah (2021	Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial	Kualitatif	banyak hal tidak terduga yang tidak dilandasi fakta yang disebar oleh banyak orang. Tanpa adanya riset dan tidak diberitakan oleh pihak yang berwenang dalam penyampaian informasi yang pasti.meyebabkan munculnya berita hoax/mis-informasi
9	Febri Nurrahmi1 & Hamdani M. Syam	Perilaku Informasi Mahasiswa dan Hoaks di Media Sosial	Kualitatif	Mahasiswa tidak percaya secara langsung informasi yang beredar di media sosial.

10	Rismawati (2025)	Sosialisasi Berita Palsu Kepada Kelompok UMKM Kelurahan Nampes Baturetno Kabupaten Malang	Kualitatif	Memberikan edukasi mengenai pemahaman para anggota kelompok usaha kecil dan menengah tentang ruang lingkup dan dampak dari adanya penyebaran berita bohong atau hoaks dalam penggunaan media sosial
11	Trina Nur Faturehmah, Tamara Adriani Susetyo-Salim (2020)	Perilaku Masyarakat Terhadap Penyebaran Hoax Selama Pandemi Covid-19 Melalui Media di Indonesia	Kualitatif dan kuantitatif	dimana banyak masyarakat menjadi cemas, khawatir, ragu, bingung akan kebenaran informasi yang disebar.
12	Aisyah Tsabitah Ulayya, Adly Muhammad Mahdy, Fadzar Rambu Alam, Muhamad Zaqi Rafliansyah, Herli Antoni(2024)	Dampak Pancasila Terhadap Perkembangan Moral dan Etika di Kalangan Generasi Z	Studi kepustakaan (<i>library research</i>)	Generasi Z, sebagai penerus bangsa, akan menghadapi tantangan dalam menjaga moralitas dan etika di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan yang pesat
13	Fadil Mas'ud , Anif Istianah(2025)	Ekosistem Digital Dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila Sebagai Penuntun Etika Publik Virtual	kualitatif	narasi kebangsaan di media sosial cenderung muncul dalam dua pola dominan. Pertama, narasi yang bersifat afirmatif dan pro-integrasi nasional, ditandai dengan kampanye digital bertema persatuan, toleransi, keberagaman, dan anti-radikalisme.
14	Muchsinin, Agus Sjafari, Rina Yulianti (2025)	Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang	deskriptif	implementasi suatu kebijakan terkait dengan pelayanan publik dapat dipastikan melibatkan banyak kepentingan, baik kepentingan yang berasal dari lembaga atau institusi sendiri maupun kepentingan bagi masyarakat sebagai pihak yang dilayani
15	Prita Rara Ulumiyah, Rindri Andewi Gati (2025)	Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website Ppid Kementerian Pemberdayaan	Kualitatif	melakukan peninjauan kembali terkait keterbukaan informasi publik, untuk mendukung peningkatan sumber daya serta kinerja individu yang berhubungan langsung dengan keterbukaan informasi publik.

		Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi		
16	Evy Febryani(2025)	Dampak Kebijakan Moderasi Konten terhadap Penyebaran Berita Palsu Berita Media Sosial di Indonesia	analisis normatif	keterbatasan kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), dalam menangani berita hoaks secara efektif.
17	Prita Rara Ulumiyah, Rindri Andewi Gati (2025)	Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portalsitus Webppid Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Deskriptif	Menciptakan informasi yang terbuka dan berkualitas di tengah gejolak ramainya arus informasi yang begitu cepat merupakan suatu tantangan bagi penyalur informasi masyarakat.
18	Dhea Rivani Gultom, Ester Yolanda, Laura Sanulo Balaki Bago, Maria Isabel Sitinjak, Nadzifa Khalishah Salim Nst (2023)	Upaya Pancasila Dalam Pencegahan Hoax Di Sosial Media Terhadap Mahasiswa	kuantitatif	Responden jurnal tersebut telah memastikan kebenaran fakta tentang berita sebelum menyebarkannya
19	Willy Oktaviani, Rahmadhona Fitri Helmi (2025)	Pendukung dan Penghambat Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pasaman	kualitatif	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman selaku PPID Utama bertanggung jawab memastikan transparansi dan akses informasi berjalan efektif melalui koordinasi dengan seluruh badan publik. Media digital, khususnya website resmi PPID (http://ppid.pasamankab.go.id/), menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi yang cepat dan mudah diakses masyarakat.
20	Sri Handiman Supyansuri	Analisis Redesain Kelembagaan Komisi Informasi Melalui Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	kualitatif	Kelembagaan KI saat ini menjadi kontroversi baik secara teoritis maupun praktis. KI, khususnya KI Pusat, memiliki 3 fungsi sekaligus yang setara yakni fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pembahasan

1. Pancasila sebagai Kerangka Etika Digital

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan etika publik di era keterbukaan informasi. Melalui prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa yang terkandung pada Pancasila dapat dijadikan dasar bagi perilaku etis di ruang publik berbasis digital. Yusuf et al. (2024) menegaskan bahwa Pancasila mampu berperan sebagai sumber etika digital yang mengarahkan warga negara untuk berperilaku bijak, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab secara moral dalam penggunaan teknologi.

Mas'ud dan Istianah (2025) menambahkan bahwa ekosistem digital Indonesia perlu dipandu oleh nilai-nilai kebangsaan agar tidak terjebak dalam budaya informasi bebas tanpa kendali moral. Pendidikan kewarganegaraan digital berbasis Pancasila juga terbukti efektif memperkuat kesadaran etika bermedia di kalangan generasi muda (Tsabitah Ulayya et al., 2024).

2. Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, tetapi masih dihadapkan pada tantangan implementasi yang beragam antar lembaga. (Trisnati et al., 2024) menemukan bahwa publikasi dokumen resmi seperti risalah rapat DPRD belum terstandar, dan masih terdapat hambatan teknis seperti rendahnya kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian Vol et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi memang meningkatkan transparansi, namun juga memerlukan pengawasan agar keterbukaan tidak disalahgunakan.

Annsiori (2023) dalam kajiannya tentang website pemerintah desa menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kapasitas institusi untuk menerjemahkan prinsip transparansi ke dalam praktik digital yang akuntabel.

3. Hoaks dan Disinformasi sebagai Tantangan Etika

Salah satu dampak negatif keterbukaan informasi adalah meningkatnya arus hoaks dan disinformasi. Irwansyah (2021) menemukan bahwa hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menjatuhkan kepercayaan publik dan memperburuk polarisasi sosial. Faturrohman & Salim (2022) menjelaskan bahwa rendahnya literasi media selama pandemi berkontribusi pada meningkatnya penyebaran informasi palsu. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nurrahmi dan Syam (2020) bahwa mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial sering kali tidak mampu membedakan informasi asli dari yang palsu. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab terhadap moral. Gerakan literasi berbasis bukti dan kolaborasi fact-checking lintas lembaga menjadi langkah penting untuk memperkuat etika publik digital (Rismawati, 2022).

4. Peran Regulasi dan Platform Digital

Penegakan etika publik di ruang digital memerlukan dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Febryani (2025) menyoroti bahwa kebijakan moderasi konten di platform digital masih perlu disempurnakan agar tidak hanya menekan kebebasan berekspresi, tetapi juga efektif menekan penyebaran berita palsu. Laporan Sarjito (2021) menegaskan bahwa disinformasi merupakan ancaman

nyata terhadap ketahanan nasional dan perlu direspons melalui sinergi antara negara, masyarakat, dan perusahaan platform.

Penelitian terbaru juga menunjukkan pentingnya dialog antara regulator, perusahaan teknologi global seperti Meta dan TikTok, serta masyarakat sipil dalam merumuskan mekanisme moderasi konten yang kontekstual dan berkeadilan (Vol et al., 2022).

5. Sinergi Nilai Pancasila dan Literasi Digital

Secara umum, aktualisasi Pancasila dalam etika publik digital membutuhkan sinergi antara kebijakan negara, pendidikan moral, dan partisipasi masyarakat. Servinta Br. Perangin-angin et al. (2025) menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa, termasuk di dunia maya. Pendidikan berbasis nilai dan kebijakan literasi digital berbasis Pancasila menjadi pilar utama untuk membangun masyarakat informasi yang berkeadaban dan bertanggung jawab (Priwardani et al., 2023).

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa tantangan etika publik di era keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dari dimensi nilai, moral, dan tata kelola. Pancasila menyediakan kerangka normatif yang mampu menyeimbangkan kebebasan informasi dengan tanggung jawab sosial, sehingga keterbukaan informasi benar-benar menjadi sarana memperkuat integritas dan keadilan publik di era digital.

KESIMPULAN

Era informasi terbuka yang ditandai dengan perkembangan cepat arus teknologi digital dan media komunikasi membawa dampak perubahan besar dalam cara pemerintahan berjalan dan cara masyarakat berinteraksi. Prinsip transparansi yang dulu hanya keharusan normatif kini menjadi kebutuhan utama dalam akses pelayanan publik. Keterbukaan sistem informasi memungkinkan masyarakat mendapatkan akses lebih luas ke data dan kebijakan pemerintah, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat, pengawasan sosial, dan kehadiran kontrol terhadap pemerintah.

Namun, keterbukaan informasi juga menimbulkan tantangan etika yang kompleks. Informasi yang begitu cepat dan masif seringkali tidak disertai kemampuan literasi digital dan etika yang cukup baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan masalah seperti pemalsuan informasi, penyebaran berita palsu, pelanggaran privasi, eksploitasi data pribadi, hingga pembentukan opini yang bias. Dalam konteks birokrasi, keterbukaan informasi tanpa pengelolaan yang etis bisa menyebabkan dilema antara hak publik untuk mengetahui dengan kewajiban negara untuk melindungi informasi sensitif dan rahasia.

Perubahan cara komunikasi yang lebih terbuka juga mengharuskan aparatur pemerintah lebih peka terhadap etika saat menyampaikan informasi dan membuat keputusan yang memengaruhi banyak orang. Etika publik di era digital tidak hanya berkaitan dengan perbuatan individu, namun juga menyangkut aspek sistemik seperti pembuatan kebijakan, pengelolaan data, dan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Maka, penguatan norma publik harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral secara bersamaan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti meningkatkan kapasitas aparatur publik dalam literasi digital dan etika, menerapkan regulasi yang bisa menyesuaikan perkembangan teknologi, serta membangun budaya organisasi yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab. Di sisi masyarakat, juga dibutuhkan partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan publik yang

sehat dan etis melalui pendidikan moral digital serta meningkatkan kemampuan kritis terhadap berita yang beredar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tantangan etika publik di era informasi terbuka tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan normatif atau teknologi saja.

Diperlukan keseimbangan antara transparansi dan tanggung jawab, antara hak mengetahui dan kewajiban menjaga integritas, serta antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya dengan hubungan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, etika publik bisa menjadi fondasi kuat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadaban di tengah era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, S., Nasiratul Maspufah, C., Nun Anggraeni, D., Tiandra, E., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). Community Participation In Building An Effective Ethics And Public Accountability System In Indonesia. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 21, Issue 3). <http://jurnaldialektika.com/>
- Dhea Rivani Gultom, Ester Yolanda, Laura Sanulo Balaki Bago, Maria Isabel Sitingjak, & Nadzifa Khalishah Salim Nst. (2023). Upaya Pancasila Dalam Pencegahan Hoax Di Sosial Media Terhadap Mahasiswa. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(4), 205–211. <https://doi.org/10.59581/garuda.v1i4.1776>
- Emina, K. A. (2020). Public Administration and Ethics in Digital Era. In *Pinisi Discretion Review* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.26858/pdr.v1i1.13760>
- Fahreza Bahtiar, M., Sari, N. A., & Annshori, M. F. (2025). From Regulation to Realization: *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Desa*. In *Journal of Public Administration and Governance Insights* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uns.ac.id/index.php/pagi/article/view/2632>
- Faturohmah, T. N., & Salim, T. A. (2022). Perilaku Masyarakat Terhadap Penyebaran Hoax Selama Pandemi Covid-19 Melalui Media di Indonesia: *Tinjauan Literatur Sistematis*. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.29240/tik.v6i1.3432>
- Febryani, E. (2025). The Impact of Content Moderation Policy on the Spread of Fake News on Social Media in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(03), 176–183. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03>
- Hutauruk, R. P., Fahmi, A., & Gilang Maulana, D. (2021). Bureaucratic Ethics in the Era of Technological Disruption: Challenges and Strategies for Bureaucratic Reform 4.0 (Vol. 06, Issue 02). <https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/4302> <https://doi.org/10.24967/jshs.v6i2.4302>
- Istani. (2022). Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022 *Aktualisasi Pancasila Dalam Pembentukan Etika Bernegara*. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2924>
- Mas'ud, F., & Istianah, A. (2025). *Ekosistem Digital Dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila Sebagai Penuntun Etika Publik Virtual*. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18–26. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i1.21505>
- Muliawaty, L., & Framesthi, D. B. (2020). Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 132–141. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i2.3219>
- Nurrahmi, F., & Syam, H. M. (2020). Perilaku Informasi Mahasiswa dan Hoaks di Media Sosial.

- Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 129–146. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.9215>
- Oktaviani, W., & Fitri Helmi, R. (2025). Diseminasi Informasi Publik: Pendukung dan Penghambat Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pasaman. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2702>
- Priwardani, A. N., Auriellia, A., Monica, D., Nur, M., & Yaasiin, F. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Etika. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79642/pdf>
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rismawati, R. (2022). Sosialisasi Berita Hoaks Kepada Kelompok Umkm Kelurahan Nampes Baturetno Kabupaten Malang. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 2(2), 76–81. <https://doi.org/10.24034/kreanova.v2i2.5306>
- Putri Sari Margaret Julianty Silaban, Seviyana Chaira Br Tarigan, & Yesi Okta Hutagalung. (2025). PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA: MENJAGA INTEGRITAS SOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 13(5), 21–30. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v13i5.11918>
- Sarjito, A. (2021). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. In *Journal of Governance and Local Politics* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>
- Servinta Br Perangin -angin, D., Pangaribuan, F., Mesak Manik, S., Yunita, S., & Dharma, S. (2025). *Pancasila Sebagai Landasan Moral Dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa*.
- Supyansuri, S. H. (2025). Analisis Redesain Kelembagaan Komisi Informasi Melalui Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Bappenas Working Papers*, 8(2), 157–180. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.408>
- Syadiyah, K., Azzahra, S., Putri, N., & Hayat, H. (2024). *The Role of Public Administration Ethics in Realizing Clean and Transparent Governance*. <https://doi.org/10.31629/juan.v12i2.7053>
- Trisnati, D., Sagita, N. I., & Centia, S. (2025). *Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Publikasi Risalah Rapat di Sekretariat DPRD Kota Bandung* <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.63041>
- Tsabitah Ulayya, A., Mahdy, A. M., Alam, F. R., Rafliansyah, Z., & Antoni, H. (2024). Dampak Pancasila Terhadap Pertumbuhan Moral dan Etika di Kalangan Generasi Z. *Student Research Journal*, 2, 260–275. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1673>
- Vol, J., Respati, A. H., Yasin, M., & Roky Huzaeni, M. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Keterlibatan Publik Dalam Komitmen Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia Melalui Platform Global Open Government Partnership. <https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250131122243-Jurnal%20KIP%20Aug%202022%205.pdf>
- Yusuf, N., Prasetyo Wibowo, A., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang, P., & Corresponding Author, I. (2024). *Digital Citizenship Education: Pancasila As A Source of Digital Ethics in Indonesia*. 9(1). <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>